

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR SKEMA.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
DAFTAR ISTILAH DAN ISTILAH KHUSUS.....	xiii
DAFTAR ISTILAH.....	xiii
DAFTAR ISTILAH KHUSUS.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
INTISARI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	11
1.4 Ruang Lingkup.....	14
1.5 Tinjauan Pustaka.....	16
1.6 Kerangka Teori.....	21
1.6.1 AWKK sebagai Kerangka Analisis Peraturan Perundang-Undangan tentang Guru.....	24
1.6.2 Analisis Linguistik dan Konteks Situasi (Halliday & Matthiessen) dan Intertekstualitas (Teun van Dijk) sebagai Landasan Integrasi Mikro-Meso.....	29
1.6.3 Level Makro: Analisis Ideologi (van Dijk).....	39
1.6.4 Sintesis dan Penutup Kerangka Teori.....	42
1.7 Metode Penelitian.....	43
1.7.1 Jenis Penelitian.....	43
1.7.2 Data dan Sumber Data.....	45
1.7.3 Pengumpulan Data.....	46
1.7.4 Analisis Data.....	50
1.7.5 Penyajian Hasil Analisis Data.....	56
1.8 Organisasi Penyajian.....	58
BAB II FITUR-FITUR LINGUISTIK POSISI GURU DALAM PERUNDANG-UNDANGAN.....	61
2.1 Pengantar.....	61
2.2 Leksis Partisipan yang Terlibat.....	62
2.2.1 Guru.....	64
2.2.2 Pemerintah.....	71
2.2.3 Masyarakat.....	76
2.3 Penggunaan Verba.....	79
2.3.1 Modalitas.....	80

2.3.2 Penggunaan Verba Pasif.....	90
2.3.3 Proses Relasional.....	93
2.3.4 Proses Verbal.....	103
2.3.5 Proses Material.....	114
2.4 Penggunaan Klausa	121
2.4.1 Klausa Simpleks	123
2.4.2 Klausa Kompleks.....	125
2.5 Penggunaan Nominalisasi	141
2.6 Penutup.....	148

BAB III KONTEKS SITUASI DALAM WACANA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG GURU.....	150
3.1 Pengantar.....	150
3.2 Medan Teks (Fungsi Ideasional)	154
3.2.1 Konteks Situasi pada Proses Relasional.....	155
3.2.2 Konteks Situasi pada Proses Verbal.....	160
3.2.3 Konteks Situasi pada Proses Material.....	164
3.3 Pelibat (Fungsi Interpersonal)	173
3.3.1 Modalitas wajib: Representasi kekuasaan Asimetris dan Disparitas Struktural ..	176
3.3.2 Modalitas dapat: Ketidaktegasan Tanggung Jawab dan Penghindaran Komitmen Negara.....	177
3.3.3 Modalitas berhak: Legitimasi Formal atas Ketidakadilan Struktural Penggunaan	180
3.4 Moda Teks (Fungsi Tekstual).....	183
3.4.1 Penggunaan Kalimat Deklaratif.....	183
3.4.2 Penggunaan Kalimat Imperatif.....	192
3.4.3 Penggunaan Kalimat Preskriptif dan Prosedural.....	197
3.5 Penutup.....	203

BAB IV IDEOLOGI DALAM WACANA PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TENTANG GURU.....	206
4.1 Pengantar	206
4.2 Legitimasi Kekuasaan dalam Perundangan tentang Guru	208
4.3 Penyembunyian Agen dalam Wacana Perundangan	218
4.4 Polarisasi Ideologis dalam Pembagian Status Guru	226
4.5 Ketimpangan Status Kepegawaian sebagai Pembentuk Identitas Profesional Guru.....	231
4.6 Penutup	238

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	242
5.1 Kesimpulan	242
5.2 Saran	249

DAFTAR RUJUKAN	251
-----------------------------	------------



LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	260
RINGKASAN DISERTASI.....	261
Daftar Isi	262
Latar Belakang.....	263
Temuan	266
Kesimpulan	274
Daftar Pustaka.....	276
DISSERTATION SUMMARY.....	277
Table of Contents.....	278
Background.....	279
Findings	282
Conclusion	290
References.....	291